OMBUDSMAN DIY AJAK MASYARAKAT SIPIL PERKUAT PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

Senin, 09 November 2026 - diy

STARJOGJA.COM, Info - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) menggelar kegiatan Ombudsman Mendengar dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa di kantor setempat, Kamis (5/11/2026). Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam pengawasan pelayanan publik.

Sejumlah lembaga yang hadir antara lain Sarang Lidi, IDEA, Caksana Institute, Indonesian Court Monitoring, Jogja Corruption Watch, PUKAT UGM, Lembaga Konsumen Yogyakarta, serta akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kegiatan ini digelar sebagai respons atas berbagai pandangan dari pihak eksternal yang disampaikan sebelumnya. Dalam forum tersebut, ORI DIY memaparkan langkah-langkah pendekatan kepada masyarakat sekaligus membuka kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan kritik, masukan, dan harapan.

ORI DIY menjelaskan tiga pendekatan utama, yakni dialog langsung melalui program Ombudsman on The Spot, Rembug Pelayanan Publik, Ombudsman Goes to Pesantren, dan Sambang Warga. Pendekatan berikutnya dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi pelayanan publik di sekolah, pemerintah daerah, media, serta perguruan tinggi. Sementara itu, pendekatan ketiga berupa penguatan jejaring dan kolaborasi dengan masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, serta perguruan tinggi di Yogyakarta.

Kepala Perwakilan ORI DIY, Muflihul Hadi, mengatakan pendekatan langsung, edukasi, dan penguatan kolaborasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengawasan pelayanan publik.

"Ombudsman tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan melalui penanganan laporan masyarakat, tetapi juga berupaya hadir di tengah masyarakat melalui pendekatan langsung, edukasi, sosialisasi, serta penguatan jejaring dengan kelompok masyarakat sipil."

Selain penanganan laporan, ORI DIY juga menerapkan mekanisme Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) untuk merespons persoalan pelayanan publik yang membutuhkan penanganan segera.

"Seperti contohnya pada masa SPMB melakukan RCO laporan masuk harus selesai pada hari itu juga" ujar Muflihul Hadi.

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, salah satunya praktik pungutan di sektor pendidikan yang dinilai masih berulang di Kota Pelajar.

Dosen UGM, Ely Susanto, menyoroti pentingnya pengawasan yang partisipatif dan proaktif. Ia mendorong Ombudsman

memperkuat pengawasan berbasis data serta melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan maladministrasi, sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada laporan yang diterima.

Ia juga menilai perguruan tinggi dapat dilibatkan lebih optimal melalui penelitian dan kajian untuk mendukung pengawasan, termasuk di tengah keterbatasan anggaran.

Sementara itu, Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta, Hamdan Kurniawan, berharap Ombudsman dapat menjalankan peran lebih luas, tidak sebatas menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, lembaga tersebut perlu menjadi mata dan telinga masyarakat dalam mengawal kualitas pelayanan publik melalui pengawasan yang proaktif, partisipatif, dan berorientasi pada pencegahan maladministrasi.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Muflihul Hadi menyatakan pandangan para peserta akan menjadi bahan penguatan pengawasan pelayanan publik, terutama dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pungutan pendidikan. Ia menegaskan komitmen Ombudsman untuk memperkuat pencegahan maladministrasi melalui pengawasan yang proaktif dan kolaboratif.

Melalui Ombudsman Mendengar, ORI DIY berharap komunikasi dan jejaring dengan masyarakat sipil dapat terus berkembang melalui dialog terbuka dan berkelanjutan. Partisipasi berbagai elemen masyarakat dinilai penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi.